



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : (021) 3843348, 3810350, 3457611 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : B-561 /BUA/KU.00/09/2016 13 September 2016
Lampiran : Dua Set Surat
Hal : Perubahan Jadwal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua

- Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Kendari
3. Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo
4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

Berkaitan dengan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-7128/PB/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Penyampaian LKKL Semester I Tahun 2016 Revisi dan Nomor : S-7239/PB/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Bulan Agustus 2016 dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2016 Revisi, dengan ini kami sampaikan perubahan jadwal kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut :

No.	Wilayah	Semula	Menjadi
1.	Kalimantan Barat	19 s.d 23 September 2016	26 s.d 30 September 2016
2.	Sulawesi Tenggara	20 s.d 23 September 2016	27 s.d 30 September 2016
3.	Gorontalo	20 s.d 23 September 2016	Dibatalkan
4.	Bali	27 s.d 30 September 2016	Dibatalkan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih

Kepala Biro Keuangan
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia



SUTISNA
NIP. 19581127 198403 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710

TELEPON (021) 3449230 PSW 5200 FAKSIMILE 021-3846402

WEBSITE : WWW.DJPBN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S- 7128 /PB/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian LKKL Semester I Tahun 2016 Revisi

7 September 2016

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum
Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semester I tahun 2016, kami telah menerima dan melakukan analisis LKKL semester I tahun 2016. Berdasarkan analisis yang kami lakukan terdapat beberapa permasalahan pada LKKL sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang tidak disusun dari seluruh satker di lingkup K/L-nya;
2. Terdapat beberapa neraca LKKL yang tidakimbang (*balance*), sehingga neraca tersebut tidak memenuhi persamaan dasar akuntansi;
3. Pada beberapa Laporan Operasional (LO) K/L terdapat akun-akun yang tidak semestinya pada LKKL antara lain:
 - Akun Pendapatan Perpajakan;
 - Akun Pendapatan Hibah;
 - Akun Beban Lain-lain;
4. Pada beberapa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) terdapat penyajian akun-akun pada LKKL yang tidak wajar atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, antara lain:
 - Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan;
 - Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas
 - Transaksi Antar Entitas termasuk selisih transfer keluar dan transfer masuk
5. Terdapat perbedaan data Persediaan dan Aset Tetap antara LKKL dengan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) pada beberapa K/L bernilai di atas Rp. 500 Miliar;
6. Pada beberapa K/L, terdapat perbedaan data belanja (*suspen*) antara SPAN dengan K/L bernilai di atas Rp. 1 Miliar.

(Detail permasalahan masing-masing K/L terlampir)

Dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL dan LKPP dan mengantisipasi audit atas LKKL tahun 2016, kiranya permasalahan di atas harus segera diselesaikan.

Terkait hal tersebut, kami meminta Saudara untuk menyusun kembali dan menyampaikan LKKL semester I tahun 2016 Revisi kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal **26 September 2016**. Kami mengharapkan LKKL tersebut telah dianalisis secara mendalam, agar LKKL semester I tahun 2016 dan periode selanjutnya dapat menyajikan transaksi-transaksi keuangan secara wajar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Manvanto Harjowiryo

NIP. 195906061983121001

Tembusan :
Menteri Keuangan RI

Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S- 7128 /PB/2016
Tanggal : 7 September 2016

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/KEPALA/WAKIL
KEPALA/ DIREKTUR UMUM KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No.	Daftar Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga
1.	Sekretaris Mahkamah Agung RI
2.	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
3.	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
4.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
5.	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
6.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
7.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
8.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
9.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
10.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
11.	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
12.	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
13.	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
14.	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
15.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
16.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
17.	Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
18.	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
19.	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
20.	Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang
21.	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
22.	Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
23.	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
24.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
25.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
26.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
27.	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
28.	Direktur SDM & Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2 - 4 JAKARTA 10710
TELEPON 021-3449230 (20 SALURAN), PSW 5200-5201, 021-3450959 FAXIMILE 021-3845402, 3454640
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-7239 /PB/2016
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal bulan
Agustus 2016 dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara / Lembaga Semester I Tahun 2016 Revisi

9 September 2016

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Jaksa Agung Muda/Sekretaris/Deputi
Administrasi/ Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga
(terlampir)

Menunjuk surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-6422/PB/2016 tanggal 10 Agustus 2016 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Bulan Juli dan Agustus 2016 dan Nomor S-7128/PB/2016 tanggal 7 September 2016 hal Penyampaian LKKL Semester I 2016 Revisi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka kegiatan rekonsiliasi eksternal Bulan Juli-Agustus 2016 dan penyusunan LKKL semester I 2016 Revisi, pada aplikasi E-rekon LK telah dibuka "periode unggah ADK SAIBA satker" mulai tanggal 3 s.d. 14 September 2016;
2. Rekonsiliasi bulan Juli dilaksanakan secara bersamaan dengan rekonsiliasi bulan Agustus 2016 dengan hanya melakukan *upload file* kirim bulan Agustus 2016 (file yang terbentuk sudah merupakan data kumulatif);
3. Batas akhir Satker mengunggah ADK SAIBA ke Aplikasi E-rekon LK adalah tanggal 14 September 2016 pukul 23.59 WIB;
4. Rekonsiliasi eksternal antara satker dan KPPN bulan Agustus 2016 dilaksanakan tanggal 3 s.d 16 September 2016;
5. Satker dan KPPN menyelesaikan proses rekonsiliasi hingga terbit BAR sampai tanggal tanggal 16 September 2016;
6. Satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi bulan Agustus 2016 atau tidak menyelesaikan rekonsiliasi hingga status "Menunggu Tanda Tangan KPA" pada aplikasi E-rekon LK, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.5/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Untuk kepentingan analisis/validasi data oleh unit pelaporan level di atas satker (UAPPAW, UAPPA-Es I dan UAPA), maka pada tanggal 15 s.d. 18 September 2016 data pada aplikasi E-rekon LK akan **dibekukan sementara**. Jika ditemukan kesalahan, UAPPAW/UAPPA-Es I /UAPA menginformasikan dan memerintahkan satker terkait untuk melakukan koreksi/perbaikan data.
8. Selanjutnya satker tersebut harus mengunggah kembali ADK SAIBA yang telah dikoreksi ke Aplikasi E-rekon LK mulai tanggal 19 s.d. 21 September 2016 pukul 23.59 WIB;
9. Bagi satker yang telah mendapatkan BAR bulan Agustus 2016 namun akan melakukan *upload* perbaikan data ke E-rekon LK, harus mengajukan permohonan reset BAR terlebih dahulu ke KPPN secara tertulis, yang dapat disampaikan dengan sarana tercepat (diantar

langsung/ melalui email/ dikirim via pos), dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 7;

10. Pada masa pembukaan kembali periode *upload* data E-rekon LK tanggal 19 s.d 21 September 2016, satker yang terkena sanksi dari KPPN mitra kerjanya, agar memanfaatkan waktu tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya supaya sanksi tersebut dicabut oleh KPPN;
11. Selanjutnya tanggal 22 September 2016, data pada aplikasi E-rekon LK akan **dibekukan kembali** untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan oleh UAPPAW/UAPPA-Es I /UAPA khusus bagi 28 Kementerian Negara/ Lembaga yang wajib menyampaikan LKKL semester I tahun 2016 Revisi;
12. Batas akhir penyampaian LKKL semester I tahun 2016 Revisi ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan adalah tanggal 26 September 2016;
13. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi dan penyelesaian LKKL semester I 2016 Revisi tercantum pada lampiran 2;
14. Daftar 28 Kementerian Negara/ Lembaga yang wajib menyampaikan LKKL semester I tahun 2016 Revisi tercantum pada lampiran 3;
15. Kementerian Negara/ Lembaga diminta menyampaikan maksud surat ini ke seluruh satker di lingkungan kerjanya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Firmansyah N. Nazaroedin
NIP. 196405191984021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan;
4. Para Direktur lingkup Ditjen Perbendaharaan;
5. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia;
6. Para Kepala KPPN seluruh Indonesia

Lampiran 1 Surat Dirjen Perbendaharaan
Nomor : S-7235 /PB/2016
Tanggal : 9 September 2016

DAFTAR PEJABAT KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
1	Sekretaris Jenderal MPR RI
2	Sekretaris Jenderal DPR RI
3	Sekretaris Jenderal BPK RI
4	Sekretaris Mahkamah Agung RI
5	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
6	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
7	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
8	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
9	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
10	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
11	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
12	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
13	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
14	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
15	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
16	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
17	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
18	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
19	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
20	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
21	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
22	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
23	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
24	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
25	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
26	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
28	Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata RI
29	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
30	Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
31	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
32	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
33	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
34	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
35	Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
36	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
37	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
38	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
39	Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
40	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
41	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
42	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
43	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
44	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
45	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
46	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
47	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
48	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
49	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
50	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
51	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
52	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
53	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
54	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
55	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
56	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
57	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
58	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
59	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
60	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
61	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
62	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
63	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
64	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
65	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
66	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
67	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
68	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
69	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
70	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
71	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72	Sekretaris Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
73	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
74	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
75	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
76	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
77	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
78	Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
79	Anggota 1 Deputi Bidang Administrasi dan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
80	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
81	Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
82	Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
83	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
84	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
85	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
86	Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif
87	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut

Lampiran 2 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S -7239 /PB/2016
Tanggal : 9 September 2016

JADWAL PELAKSANAAN REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

No	Kegiatan	Waktu
1	Unggah ADK SAIBA satker ke E-rekon LK untuk : • Rekonsiliasi Agustus 2016 • Koreksi data dalam rangka penyusunan LKKL semester I 2016 Revisi	3 s.d. 14 September 2016
2	Satker dan KPPN menyelesaikan proses rekonsiliasi hingga terbit BAR	3 s.d 16 September 2016
3	Pembekuan (<i>freezing</i>) sementara data E-rekon LK. UAPPAW, UAPPA-Es I dan UAPA melakukan analisis/validasi data satker dan selanjutnya memerintahkan satker yang ditemukan kesalahannya agar melakukan perbaikan data.	15 s.d. 18 September 2016
4	Satker memiliki kesalahan data mengunggah kembali ADK SAIBA yang telah dikoreksi ke E-rekon LK,	19 s.d 21 September 2016
5	Satker yg terkena sanksi mengunggah ADK SAIBA dan menyelesaikan rekonsiliasi, agar sanksi dicabut oleh KPPN	19 s.d 21 September 2016
6	UAPPAW / UAPPA-Es I / UAPA menyusun laporan keuangan semester I tahun 2016 Revisi.	22 s.d 26 September 2016
7	LKKL semester I 2016 Revisi disampaikan ke Ditjen Perbendaharaan	Paling lambat 26 September 2016

Lampiran 3 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S - 7235 /PB/2016

Tanggal : 9 September 2016

**DAFTAR KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA YANG HARUS MENYUSUN
LKKL SEMESTER I TAHUN 2016 REVISI**

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Mahkamah Agung
2.	Kementerian Dalam Negeri
3.	Kementerian Luar Negeri
4.	Kementerian Pertahanan
5.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6.	Kementerian Keuangan
7.	Kementerian Pertanian
8.	Kementerian Perindustrian
9.	Kementerian Perhubungan
10.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Kementerian Agama
12.	Kementerian Ketenagakerjaan
13.	Kementerian Sosial
14.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
16.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
18.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19.	Badan Pusat Statistik
20.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
21.	Kepolisian Negara
22.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
23.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
24.	Komisi Pemilihan Umum
25.	Kementerian Perdagangan
26.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
27.	Badan Pengawas Pemilu
28.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia